

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAPORAN *ON-LINE* KEUANGAN

Rohani, Tri Sukirno Putro dan Harapan Tua

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation of Financial Online Reporting Policy. This study aims to find out analyzing the implementation of the on-line reporting policy with Presidential Decree number 20 of 2015 concerning the Evaluation and Supervision Team for the Realization of the State Revenue and Expenditure Budget and the Regional Budget and Budget. This type of research is qualitative. The research informants consisted of key informants, key informants and additions. Methods of data collection are interviews, observation and documentation. Based on the results of the study Implementation of this online reporting policy is still not optimal, as is the case with problems that are still not optimal policy goals and objectives in the sense that they have not been well socialized to all staff working in their fields, then the problem of budget constraints to finance all supporting facilities for this policy . Factors that hinder the implementation of the policy of implementing online reporting in the transportation agency of the Kampar district is that the objectivity is still low, the assessment is only for those who have the ability, while those who have worked long but the limited ability to understand finally they cannot do what they should do it.

Keywords: policy implementation, on-line reporting, communication, resources

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelaporan *On-Line* Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis implementasi kebijakan pelaporan *on-line* sesuai dengan Keppres nomor 20 tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. Jenis penelitian adalah kualitatif. Informan penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama dan tambahan. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi kebijakan pelaporan online ini masih belum optimal, seperti halnya pada masalah masih belum optimalnya maksud dan tujuan kebijakan dalam arti masih belum di sosialisasikan dengan baik kepada seluruh staf yang bekerja dibidangnya, kemudian masalah keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh fasilitas pendukung kelancaran kebijakan ini. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi kebijakan pelaksanaan pelaporan *on-line* di dinas perhubungan kabupaten kampar ialah objektivitasnya masih rendah, penilaian yang dilakukan hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan saja, sedangkan mereka yang telah lama bekerja namun keterbatasan kemampuan menjadi lambat memahaminya akhirnya mereka tidak dapat melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pelaporan *on-line*, komunikasi, sumber daya

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. Keppres ini intinya mengatur tentang pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), yang tugasnya antara Lain memfasilitasi Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang

terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 2 Keppres Nomor 20 Tahun 2015). Secara administrasi seluruh proses pembangunan infrastruktur dan suprastruktur harus melaporkan realisasi fisik dan keuangan dalam suatu mekanisme yang di sebut dengan TEPRA. Mekanisme ini menuntut Daerah untuk setiap bulannya melaporkan pelaksanaan APBD secara menyeluru-

ruh. Tidak terkecuali di Kabupaten Kampar bahwa Kabupaten wajib melaporkan Realisasi APBD dan system TEPRRA tersebut. Bahan penyusunan realisasi APBD ini dikumpulkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar kepada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang adadi Kabupaten Kampar.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengirim data tersebut dengan system printout, sehingga harus diketik ulang oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar untuk dientry ke system TEPRRA. Terjadi kecenderungan keterlambatan setiap OPD dalam pengumpulan Data ini. Setelah dicermati oleh pejabat-pejabat yang terkait ternyata keterlambatan ini disebabkan oleh lambannya data dari masing-masing pejabat eselon IV untuk mengumpulkan kepada Sub Bagian Perencanaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kampar Dinas Perhubungan menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan input data oleh masing-masing Pejabat Eselon IV dengan system on-line dengan menggunakan aplikasi berbasis web dan android.

Sejalan dengan itu, sumber daya manusia (SDM) yang ada di dinas-dinas atau lembaga-lembaga pemerintahan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ada dari segi teknologi, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti laptop dan jaringan internet. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dalam pelaksanaan kebijakan pelaporan *on-line* keuangan ini belum efektif dan efisien untuk memudahkan administrasi. Berdasarkan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaporan *on-line* keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya?.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tuju-

an yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menhantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009).

Banyak defenisi yang dibuat para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Defenisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa defenisi lain. Banyak paka menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai nilai untu masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002).

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusul seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mncapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu, menurut Carl J. Frederick dalam Ismail Nawawi (2009). Sedangkan James E. Anderson dalam Edi Suharto (2005) mendefenisikan kebijakan publik sebaga perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut Hughes dalam Subarsono (2005) pendekatan kebijakan publik ada dua yaitu analisis kebijakan dan kebijakan publik. Analisis kebijakan lebih berfokus pada studi pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan matematika canggih. Sedangkan pada pendekatan kebijakan publik politik lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik dari pada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sbagai faktor penentu, dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan lingkungan.

Laswel dan Kaplan (1988) mengemukakan proses pembuatan kebijakan dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan atau pengambil kebijakan baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota. pengambilan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang. Sedangkan menurut Wibawa, dkk (1994) menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. guna mencapaitujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut.

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

Laporan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Berikut ini merupakan pengertian pelaporan menurut Keraf (2001) dalam Rajab (2009), laporan adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah dipahami. Dalam penyampaiannya, laporan dapat berupa lisan maupun tertulis.

Menurut Edward III (1980) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to imple-*

mentation. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu *communication, resource disposition or attitudes dan beureucratic structures*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pelaporan *on-line* keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Administrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan medel interaktif dengan proses mulai dari penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Standar Kebijaksanaan dan Tujuan

Kejelasan tujuan program dan tingkat konsensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut. Semakin besar tingkat kejelasan semakin besar tingkat konsensus pelaksana terhadap tujuan suatu program, maka semakin mungkin pula para implementor bekerja secara efektif guna mencapai keberhasilan implementasi. Sebaliknya semakin tidak jelas tujuan dan semakin kurangnya konsensus terhadap tujuan suatu program, maka akan mendorong ketidakberhasilan implementasi.

Pemerintah Kabupaten Kampar menerapkan sistem pelaporan online ini sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia keppres nomor 20 tahun 2015 dijelaskan bahwa:

- a. Pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBN dan APBD (TEPRA) yang tugasnya memfasilitasi penyelesaian terhadap

hambatan hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- b. Melaporkan realisasi fisik dan keuangan dalam suatu mekanisme yang disebut TEPRRA. Mekanisme ini menuntut daerah untuk melaporkan pelaksana APBD secara menyeluruh dan di entry ke sistem online dengan menggunakan aplikasi berbasis web dan android.

Rincian keputusan kebijaksanaan secara menyeluruh yang berwujud peraturan menuju penentuan standar yang spesifik dan konkrit untuk menilai kinerja program. Berkaitan dengan kebijakan sistem TEPRRA, pengelolaan keuangan daerah juga harus mengacu pada prinsip-prinsip good goverment. Salah satu bentuk pelaksanaan good goverment adalah optimalisasi pemanfaatan e-goverment dalam perbaikan kinerja dan pelayanan organisasi publik.

Dinas perhubungan menerapkan prosedur e-goverment dengan cara menerapkan pelaporan online keuangan sesuai dengan Keppres nomor 20 tahun 2015 dan IMPRES nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-goverment. Berikut hasil wawancara dengan para informan mengetahui pengetahuan informan tentang kebijakan pelaporan sistem online untuk menilai kinerja program. Dari uraian mengenai informasi tentang kebijakan pelaporan dengan sistem online ini, maka dapat dikatakan bahwa sebagian dari pihak yang berkepentingan dalam implementasi ini sudah lebih dulu mengetahui dan mengantisipasinya. Akan tetapi masih ada pihak-pihak dari OPD sebagai sasaran dari kebijakan ini yang masih belum memahami dengan baik, seperti para pejabat Esselon IV yang masih belum mengerti dengan menggunakan sistem aplikasi online ini.

Sumber Daya

Kebijaksanaan mencakup lebih dari sekedar standar dan sasaran, tapi juga me-

nuntut ketersediaan sumberdaya yang akan memperlancar implementasi. Sumberdaya ini dapat berupa teknologi serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Sumber-sumber (resources), dimana sumber-sumber memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena tidak akan efektif apabila sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai. Sumber-sumber yang dimaksud dalam hal ini adalah unsur staf sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, dukungan lingkungan kerja serta adanya wewenang melaksanakan kebijakan pelayanan umum.

Dari informasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya yang melakukan pelayanan sistem online ini masih dinilai belum optimal. Pertama berkaitan dengan informasi yang diberikan kepada staf pegawai pelaksana pelayanan, kemudian masalah fasilitas yang masih kurang seperti laptop. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri dalam rangka melaksanakan kebijakan ini, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan masalah dalam mempersiapkan pelaksanaan sistem data secara online. Kemudian juga masalah keterbatasan fasilitas ketersediaan peralatan seperti laptop, kondisi jaringan ditambah juga dengan operator petugas terbatas yang membuat sistem ini masih belum optimal.

Karakteristik Organisasi Pelaksana Sistem Online

Karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf pelaksana, dukungan legislatif dan esekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Dalam proses implementasi program, pelaksana program mempunyai peranan yang cukup penting atas keberhasilan maupun kegagalan. Untuk itu setiap implementasi program diperlukan pelaksana yang tepat baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Di samping itu, yang tak boleh dilupakan bahwa pelaksana tersebut harus mempunyai

komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi program. Karena dengan komitmen yang tinggi itu akan dapat mendorong mereka untuk mengembangkan berbagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal. Termasuk diantaranya adalah mengembangkan koordinasi yang solid di antara pelaksana program, maka mereka akan melakukan kegiatan sesuai dengan persepsi dan kepentingan masing-masing sehingga pada gilirannya keberhasilan implementasi sulit tercapai Muhaji (2003).

Pegawai atau staf yang telah menerapkan sistem online ini sudah memberikan kinerja yang terbaik kepada atasannya dalam rangka menyelesaikan tugasnya untuk kelancaran pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut, memang masih dirasakan keterbatasan yang dimiliki beberapa pegawai lainnya sehingga dirasakan belum terlaksana dengan optimal. Seperti terdapatnya beberapa pegawai yang masih belum memahami sistem online dan belum mengerti dalam pemakaian komputersisasi.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Komunikasi (communication), dimana komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan sebab komunikasi sarana untuk menyebarkan informasi baik dari atas kebawah maupun sebaliknya. Dalam hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi tentang penataan organisasi, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, isi informasi harus jelas serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaiannya. Edward (1980)

Uraian mengenai komunikasi antar organisasi dalam hal ini dirasakan memang mengalami kesulitan dalam rangka menjalankan kebijakan ini, kami menghadapi persoalan dalam rangka memenuhi semua harapan. Akses internet menjadi kendala dalam rangka melengkapi sumberdaya manusia yang diperlukan.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Implementasi suatu program akan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan-perubahan yang dituntut oleh program itu akan mengancam kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terancam oleh adanya program akan cenderung menampilkan sikap oposisinya baik secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu, semakin besar adanya kelompok yang dirugikan akibat program, maka proses implementasi program itu akan semakin sulit. Sebaliknya semakin kecil kelompok masyarakat yang merasa dirugikan maka semakin mudah program tersebut diimplementasikan.

Kondisi ekonomi dinas yang belum mencukupi kebutuhan fasilitas dari program ini memang dirasakan sulit, dimana jelas semakin banyaknya suatu program diperbarui maka semakin banyak pula jumlah fasilitas serta sumber daya manusia dan sumberdaya ekonomi yang dibutuhkan. Sesungguhnya jika pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung fasilitas ini, misalnya dari segi internet jaringan maka OPD yang menerapkan sistem online ini bisa meminimalisir kendala yang ada sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan.

Disposisi Sikap Para Pelaksana

Persepsi pelaksana dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berubah sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya. Ruang lingkup pengambilan keputusan juga berpengaruh terhadap implementasi keputusan tersebut. Ada keputusan yang diambil oleh sekelompok kecil policy maker di instansi pusat, namun ada pula keputusan yang diambil dengan melibatkan policy maker baik yang berada di pusat maupun di daerah. Keputusan jenis pertama akan lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan jenis keputusan kedua. Namun bukan berarti bahwa sentralisasi lebih unggul dari desentralisasi. Tetapi yang lebih jelas bahwa desentralisasi agar

dapat berhasil membutuhkan tanggung jawab lebih besar dari para aktor baik yang berada dipusat maupun daerah. Para pelaksana dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang dirasakan masih ada keterbatasan-keterbatasan mereka, khususnya berkaitan dengan masalah sumberdaya manusia, anggaran sehingga pemerintah selektif dalam melakukan keputusan.

Pada dasarnya kebijaksanaan atau program yang dilaksanakan dalam suatu susana sistem politik tertentu, melibatkan banyak kepentingan, baik ditingkat pusat maupun daerah, baik dilingkungan politisi, birokrat maupun kekuatan sosial dan bisnis. Masing-masing aktor dalam kadar tertentu mempunyai kekuasaan dan strategi tersendiri untuk memperjuangkan kepentingannya. Keberhasilan implementasi suatu program akan sangat tergantung kepada seberapa jauh perebutan kepentingan dari aktor yang terlibat tidak mengganggu pencapaian suatu tujuan program. Jika kelompok sasaran berada pada posisi yang lemah sebelum bersaing dengan kelompok sosial lainnya guna memperoleh akses terhadap program, maka implementasi program menghadapi ancaman yang serius dan akan sulit dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan pelaksanaan pelaporan online realisasi keuangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Faktor yang menghambat belum optimalnya implementasi kebijakan pelaksanaan pelaporan online antara lain :

1. Objektifitas masih rendah, penilaian yang dilakukan hanya kepada mereka yang memiliki kemampuan saja, sedangkan mereka yang telah lama bekerja namun keterbatasan kemampuan menjadi lambat memahami akhirnya mereka tidak dapat melakukan apa yang seharusnya mereka kerjakan.

Penilaian hanya dilakukan kepada pejabat administrasi, sedangkan para staf pegawai yang bekerja se-

bagai anggota masih kurang mendapatkan fasilitas serta sosialisasi terhadap kebijakan pelaporan online ini.

Penilaian ini masih kurang objektif, sehingga masih terdapat staf yang belum mampu melengkapi laporan sehingga berdampak pada keterlambatan pengiriman laporan.

2. Kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, masih belum optimal dari mulai kesiapan sumberdaya manusia serta fasilitas-fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan ini. Masalah prosedur pelaksanaan sistem pelaporan online yang kurang disosialisasikan kepada staf menyebabkan ketidakpahaman dari staf yang bekerja.

PEMBAHASAN

Kebijakan pelaksanaan pelaporan dengan sistem online dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan e-goverment dalam pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dan OPD di instansi pemerintah kabupaten kampar mulai menerapkan sistem online dalam pelaksanaan pelaporan. Sistem manual dalam pelaporan yang telah lama dilakukan sebagai penyelesaian pekerjaan di anggap perlu adanya perubahan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.

Kemudian dilihat di lapangan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan pelaporan online ini masih belum optimal, seperti halnya pada masalah masih belum optimalnya maksud dan tujuan kebijakan dalam arti masih belum di sosialisasikan dengan baik kepada seluruh staf yang bekerja dibidangnya, kemudian masalah keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh fasilitas pendukung kelancaran kebijakan ini. Selain itu masalah agen pelaksana yang masih belum siap melaksanakan kebijakan ini serta disposisi sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dengan persepinya masing-masing.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan lister (1980) bahwa sebagai hasil maka implementasi menyangkut tindakan

seberapa jauh arah yang telah di programkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatnya abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program implementasi dapat di konseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat. Sebagai suatu proses, implementasi merupakan rangkaian keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat dalam suatu akibat atau efek. Karakteristik esensial dari proses implementasi adalah kinerja (performance) yang tepat waktu dan memuaskan. Akhirnya pada tingkat abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah yang menjadi sasaran program.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menurut Islamy (1987) suatu kebijakan dapat pula mengalami kegagalan pada tahap implementasinya meskipun pengambilan kebijakan telah merasa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya tetapi kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya beberapa hal yaitu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, tidak dikuasainya berbagai permasalahan oleh para pelaksana sehingga tidak mampu bekerja secara efisien sehingga hambatan yang ada tidak mampu menanggulangi. Sedangkan keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pelaporan online di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar ini masih belum optimal, dalam arti masih belum di sosialisasikan dengan baik kepada seluruh staf yang bekerja di bidangnya, kemudian keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh fasilitas pendukung kelancaran kebijakan ini. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi kebijakan pelaksanaan pelaporan online di

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar ialah :

- Objektifitasnya masih rendah, kurang dipahami oleh para pegawai/staf yang bekerja mengenai sistem pelaporan On-line.
- Sebagian dari pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang telah Lama Bekerja (Berumur Senior) merasa kurang berminat untuk melaksanakan atau belajar mempelajari sistem Online ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab (1990) *Analisis Kebijakan Negara* Jakarta, Rineka Cipta.
- Edward (1980) *Implementing Public Policy*, Washington, Congressional Quarterly Inc.
- Islamy, Irfan, 2002, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Lister (1980) *Public Implementation Process : A Conceptual Framework*, Administration and Society 6.
- Nawawi, Ismail. 2007. *Publik Polici*. Surabaya : Pmn.
- Nawawi, Ismail, 2009, *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya, Putra Media Nusantara.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT. Reflika Aditama.
- Suharto, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinta, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Raja grafindo persada.